



Buletin Parlementaria

Nomor 1228/II/XII/2022 • Desember 2022



UU KUHP Telah Serap Seluruh Aspirasi Masyarakat Indonesia



3 Bertemu Pimpinan
Parlemen Qatar,
Puan Dorong
Peningkatan
Investasi di RI



5 DPR Akan Gelar
Paripurna Khusus
Pengesahan
Calon Panglima
TNI



9 772614 339005



UU KUHP Telah Serap Seluruh Aspirasi Masyarakat Indonesia

DPR RI dan Pemerintah secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disetujui menjadi UU. Seluruh Fraksi di Komisi III DPR RI dan pemerintah telah menyampaikan pendapatnya dan menyetujui agar UU KUHP ini dapat disahkan. Penyempurnaan RUU KUHP secara holistik telah mengakomodasi masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto dalam 'Pandangan Komisi III DPR RI Tentang Urgensi UU KUHP' saat konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI bersama Menkumham Yasonna Laoly dan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

"Mengingat rumit dan luasnya cakupan substansi materi UU KUHP, sebagaimana permintaan pemerintah dalam penundaan pengesahan RUU KUHP pada Periode 2014-2019, pemerintah bersama DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi naskah UU KUHP ini dengan berbagai elemen masyarakat terutama para akademisi dan masyarakat hukum pidana dari berbagai lembaga dan universitas, sehingga meningkatkan partisipasi publik secara signifikan," ujar Bambang Pacul, sapaan akrabnya.

Selanjutnya Komisi III akan terus mengawal dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan UU KUHP yang baru akan berlaku



FOTO: RSB/PDT

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto dalam 'Pandangan Komisi III DPR RI Tentang Urgensi UU KUHP' saat konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 bersama Menkumham Yasonna Laoly di Ruang Rapat Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12). Foto: Runi/Man

3 tahun sejak diundang-undangkannya UU KUHP ini (tahun 2025), terutama peraturan pelaksana dan seluruh instrumen atau infrastruktur pendukungnya agar sesuai dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Beberapa hal penting yang menjadi perkembangan baru dan diatur dalam UU KUHP ini diantaranya adalah penerapan asas legalitas materiil dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), doktrin *ultimum remedium* keadilan restoratif dan penerapan diversi, perluasan subyek

hukum pidana, penerapan asas pertanggungjawaban mutlak dan pengganti, pengaturan jenis pidana pokok baru (pengawasan dan kerja sosial) dan penerapan pidana mati bersyarat.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjelaskan KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih dalam momen bersejarah ini," ujar Yasonna. ● **pun/aha**



Bertemu Pimpinan Parlemen Qatar, Puan Dorong Peningkatan Investasi di RI



Ketua DPR RI Puan Maharani berfoto bersama Ketua Majelis Syuro Qatar, Hassan bin Abdullah Al-Ghanim di Doha, Qatar.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa dalam hubungan ekonomi, Qatar merupakan mitra strategis Indonesia dalam sektor perdagangan, walaupun neraca perdagangan Indonesia masih defisit. Dalam periode Januari-Juli 2022, nilai perdagangan Indonesia-Qatar mencapai USD758 juta, naik hampir 30% dari tahun sebelumnya.

"Saya berharap kita bisa terus mendorong peningkatan arus perdagangan kedua negara. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan dukungan untuk peningkatan investasi Qatar di Indonesia," ucap Puan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Syuro Qatar, Hassan bin Abdullah Al-Ghanim di Doha, Qatar seperti dalam keterangan tertulisnya kepada **Parlementaria**, (5/12/2022).

Peluang peningkatan investasi Qatar di Indonesia disebut dapat

dilakukan dengan keterlibatan 'Qatar Investment Authority' (QIA) pada berbagai proyek investasi di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti soal perlindungan WNI di Qatar.

"Saya berharap perhatian dan dukungan Dewan Syuro agar para pekerja migran Indonesia di Qatar dapat bekerja dengan baik dan terlindungi haknya," harap Puan. Selain dengan Hassan bin Abdullah Al-Ghanim, Puan juga bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro Qatar, Hamda bint Hassan Al-Sulaiti. Kedua pimpinan parlemen perempuan itu berbicara soal isu kesetaraan gender.

Kepada Hamda bint Hassan Al-Sulaiti, Puan menyampaikan pentingnya inisiatif untuk penguatan pemberdayaan perempuan dalam memberikan kontribusi bagi perdamaian, khususnya di Afghanistan. Inisiatif terkait hal ini telah disetujui oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. ● **ayu/aha**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Ardhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E. Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Indonesia Perkuat Kerja Sama Pertahanan dengan Singapura dan Fiji



FOTO: IKA/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Sugiono dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

DPR RI dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, bersama Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang kerja Sama Pertahanan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang

Kerja Sama Bidang Pertahanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pengesahan tersebut telah disetujui oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI.

Menurut laporan yang diterima Komisi I, kata Dasco saat Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (6/12), serta hasil monitoring yang diterima pimpinan bahwa untuk kesepakatan dari Tingkat I dan dibawa ke Tingkat II, seluruh fraksi menyetujui pengesahan kedua RUU itu menjadi UU. Parlemen berharap

kerja sama pertahanan Indonesia dengan kedua negara dapat saling memperkuat penjagaan kedaulatan masing-masing.

"Tentu, perjanjian pertahanan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kepercayaan, dan pengertian," sebut Anggota Komisi I DPR RI Sugiono saat membacakan laporan Komisi I terhadap kedua beleid tersebut saat Rapat Paripurna berlangsung. Sejalan dengan peningkatan hubungan antar kedua negara tersebut, ia melanjutkan, DPR berharap masing-masing negara dapat menyerap pengalaman sekaligus pengetahuan, terutama bidang teknologi pertahanan.

"Politik luar negeri Indonesia dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes. Wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalannya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat," tuturnya.

Selain transfer pengalaman dan pengetahuan, Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu menekankan kerja sama bidang pertahanan akan menentukan secara signifikan posisi tawar negara dalam tatanan hubungan antarnegara dan politik internasional. Bagi Sugiono, kerja sama ini berpotensi tidak hanya meminimalisasi potensi ancaman, akan tetapi juga meningkatkan kemampuan industri pertahanan negara.

Mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyambut baik adanya kedua RUU Perjanjian Kerja Sama Pertahanan itu. Dimana selanjutnya, kedua UU tersebut akan menjadi payung hukum kerja sama bidang Pertahanan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura dan Pemerintah Republik Fiji. ●

ts,bia/aha

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



DPR Akan Gelar **Paripurna Khusus Pengesahan Calon Panglima TNI**

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menyampaikan DPR akan

menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal dalam waktu dekat. Rapat Paripurna tersebut dilakukan untuk mengesahkan Laksamana Yudo Margono, sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

"Kita akan Rapat Paripurnakan khusus untuk pengesahan Panglima TNI dalam waktu dekat. Jadi acara tunggal hanya untuk pengesahan Panglima TNI, acara tunggal," ujar Lodewijk kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Lodewijk menambahkan, setidaknya ada dua kali rapat Paripurna akan dilakukan menjelang masa reses pada pertengahan bulan ini. Kedua Rapat Paripurna tersebut yakni pengesahan pertimbangan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono menjadi calon panglima TNI serta Pidato Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. "Insya Allah kita masih ada dua paripurna lagi ya," katanya.

Kendati demikian, Politisi dari Fraksi Golkar ini belum bisa memastikan waktu pelaksanaan Rapat Paripurna khusus untuk pengesahan calon Panglima TNI. Sebelumnya, rapat internal Komisi I DPR RI pada Jumat, 2 Desember 2022 menyepakati Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Kesepakatan itu diputuskan setelah Laksamana Yudo Margono menjalani rangkaian uji kelayakan



FOTO: MRO/PDT

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus saat di doorstop wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

dan kepatutan calon Panglima TNI. Rapat Internal Komisi I DPR RI juga menyetujui pemberhentian Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Komisi I DPR mengapresiasi dedikasi Jendetal Andika karena telah memajukan institusi TNI.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi I DPR RII Arwani Thomafi mendorong agar Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan profesionalisme tantara nasional sebagai pelindung rakyat. Sebab, periode kepemimpinan Panglima

TNI yang akan diembannya relatif singkat, namun ada banyak tanggung jawab yang akan dihadapi.

"Ada banyak hal yang memang harus menjadi perhatian bagi TNI. Salah satunya adalah bagaimana memprioritaskan di masa yang tidak cukup panjang ini beberapa prioritas, terobosan dari Panglima (baru) untuk memberikan satu porsi bagaimana membuat TNI ini lebih mampu meningkatkan profesionalisme, lebih mampu meningkatkan posisi dari TNI untuk betul-betul menjadi pelindung rakyat," papar Arwani. • **ann,ssb/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sambut Investasi Jepang, Rachmat Gobel Dorong Peningkatan Kualitas SDM Indonesia



FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) DPR RI Rachmat Gobel saat mendampingi mantan Perdana Menteri Jepang, Yosua Fukuda berkunjung ke Universitas Darma Persada, Jakarta, Minggu (4/12).

Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan

(Korinbang) DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, investasi yang dilakukan Jepang saat ini membuka kesempatan untuk keterlibatan sumber daya manusia (SDM) dari Indonesia. Jepang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi berkualitas.

"Sekolah dan kampus Indonesia penting untuk bisa menyiapkan SDM yang bisa

memahami teknologi, ilmu dan pemikiran di dalam industri Jepang," ujar Gobel se usai mendampingi mantan Perdana Menteri Jepang, Yosua Fukuda berkunjung ke Universitas Darma Persada, Jakarta, Minggu (4/12).

Dari keterangan pers yang dikutip **Parlementaria**, Senin (5/1/2022), Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan, peningkatan sektor pendidikan harus menjadi faktor utama dalam memandang kerja sama investasi antara Indonesia dan Jepang. Pemangku kepentingan

pendidikan Indonesia harus bisa merespon kebutuhan tenaga kerja yang hadir di Jepang.

"Karena saat ini Jepang butuh tenaga kerja. Kita bisa lihat juga dari investasi Jepang di Indonesia. Tinggal dengan investasi yang baik ini, kita lihat bagaimana kesiapan SDM kita," kata Legislator Dapil Gorontalo itu. Sebagaimana diketahui, kedatangan mantan Perdana Menteri Jepang Yosua Fukuda ke Jakarta dalam rangka melihat perkembangan kerja sama antara Jepang dan Universitas Darma Persada Jakarta. ● **sf/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi II Nilai **Sistem Pelayanan Publik Kota Bogor Cukup Baik**

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR RI Endro Suswanto Yahman menilai, sistem pelayanan publik Pemerintah Kota Bogor sudah cukup baik dan bagus. Hal itu ditunjukkan dengan adanya dukungan digitalisasi yang memadai. Namun, menurutnya, perlu juga meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat agar dapat memanfaatkan pelayanan publik yang sudah memadai tersebut.

Diketahui, Kunspik Komisi II DPR RI ke Kantor Walikota Bogor ini dalam rangka untuk melihat dan mendengar secara langsung, kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem pelayanan publik di Kota Bogor. "Kalau pelayanan publik di Kota Bogor

ini memang sejak dahulu baik, sudah baik, sistemnya juga sudah terkoordinasi dengan baik, IT-nya jg sudah berjalan dengan baik. (Hal yang perlu) peningkatan-peningkatan itu paling bagaimana itu mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan dari sistem yang sudah mapan ini," katanya di Balai Kota Bogor, Paseban Sri Bima, Jawa Barat, Senin (5/12).

Selain mengevaluasi pelaksanaan sistem pelayanan publik, Kunspik ini juga dalam rangka meninjau implementasi dari UU Cipta Kerja dalam sistem pelayanan publik. Dari paparan yang disampaikan, kendala

yang paling dasar adalah banyaknya proyek perizinan usaha yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan turunan UU Cipta Kerja.

"Kalau pelayanan publik di Kota Bogor sudah baik, sudah bagus, di mana kementerian/lembaga banyak yang terlibat dalam mal pelayanan publik. Tetapi, ada salah satu hal yang mendasar, kaitannya bahwa banyak sekali proyek perizinan yang harus penyesuaian dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law," tandasnya.

Menurutnya, perubahan-perubahan turunan dari Omnibus law ini butuh penyesuaian ke dalam petunjuk pelaksanaan teknis dan peraturan daerahnya. Karena itu, penyesuaiannya ke dalam juklak dan juknis ini menjadi hambatan yang mendasar dikarenakan perlu adaptasi dengan perubahan-perubahan mendasar tersebut.

Endro menambahkan, dengan adanya UU Cipta Kerja ini mengharuskan ada penyesuaian turunannya, baik dari KemenPAN-RB maupun Kemendagri yang berupa surat edaran. Sehingga, penyesuaian ini sudah pasti berdampak kepada perubahan-perubahan teknis mendasar, di dalam sistem pemerintah daerah setempat.

Sementara, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim berharap Komisi II DPR RI dapat mengkomunikasikan seluruh kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor

kepada Pemerintah Pusat, utamanya kendala implementasi UU Cipta Kerja yang terkait dengan perizinan usaha. ●

ndy/rdn



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR RI Endro Suswanto Yahman.

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: NDY/PDT

Komisi III & Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan

Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)

Yasonna Laoly beserta jajaran Kemenkumham serta Kementerian Luar Negeri yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (5/12) secara sah menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan untuk disepakati bersama dalam pembahasan tingkat I. Tercatat, masing-masing 9 Fraksi menyatakan persetujuannya melalui pandangan mini fraksi.

Usai pandangan fraksi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh selaku pimpinan rapat kemudian menanyakan kepada segenap Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI berkaitan dengan apakah RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui dalam pembahasan tingkat I yang kemudian dijawab serentak "setuju" oleh segenap Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly mewakili penjelasan Presiden menyampaikan rencana RUU tentang Pengesahan



FOTO: IKA/PDT

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly serta Kementerian Luar Negeri yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (5/12).

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua DPR dan menugaskan Menteri Luar Negeri serta Menkumham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan rencana UU tersebut dengan DPR RI.

Adanya kerja sama ekstradisi dengan Singapura untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya berada di Singapura. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Singapura tentang ekstradisi

buronan pemerintah Republik Indonesia perlu menindaklanjuti pengesahan perjanjian dengan UU sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

"Perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Singapura tentang ekstradisi buronan mengatur antara lain kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisi, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung serta pengaturan penyerahan. Pengesahan perjanjian ini nantinya akan mendukung penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi kedua negara," tutur Menkumham. ● **pun,vri/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



BUMN Perkebunan dan Kehutanan Harus Berkolaborasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Komisi IV DPR RI sepakat meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V untuk saling berkolaborasi. Pasalnya, kolaborasi ini krusial dalam rangka pelaksanaan program strategis pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di dalam maupun sekitar wilayah kerja perusahaan.

"Kami ingin BUMN bidang perkebunan dan bidang kehutanan meningkatkan kinerjanya, termasuk meningkatkan kualitas hutan dan kebun sebagai aset milik perusahaan. Kolaborasi juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada

di dalam dan sekitar wilayah kerja," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat rapat dengan BUMN sektor kehutanan tersebut di Gedung Nusantara, Selasa (6/12).

Oleh karena itu, mewakili Komisi IV DPR RI, Politisi F-PKB itu mendorong BUMN-BUMN bidang perkebunan dan kehutanan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) berupa sosialisasi program berbasis kemasyarakatan, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ia pun berharap dengan rangkaian bimtek ini berkontribusi peningkatan kuantitas dan komoditas perkebunan.

"BUMN ini perlu meningkatkan kinerja untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas komoditas yang tinggi dalam mendukung

perekonomian negara di sektor perkebunan dengan melibatkan petani dan pelaku usaha," pungkas Anggia.

Selanjutnya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan peran perkebunan bagi Indonesia. Ia memaparkan, perkebunan jika dikelola sebaik-baiknya, berpotensi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan potensi yang besar itu, Sudin ingin BUMN bidang perkebunan dan kehutanan menjaga sumber daya alam yang menjadi aset perusahaan. Terakhir, ia menekankan konflik lahan sekitar wilayah kerja harus segera diselesaikan dengan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Segera selesaikan konflik lahan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Kelola juga pemberian akses, dan tingkatan partisipasi antar-stakeholder dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah kerja perusahaan. Serta pembiayaan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha pada masing-masing perusahaan," tandas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. • ts/rdn



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini.

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: ARF/PDT

Konsumen Meikarta Keluhkan Kejelasan Hunian, Lasarus: Cara Kerja Meikarta Memalukan

Ketua Komisi V Lasarus menerima aspirasi dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang menuntut kejelasan haknya terkait hunian apartemen yang tak kunjung diserahkan. Lasarus menghimbau agar perusahaan pengembang dapat memperjelas persoalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Lasarus, buntut ketidakjelasan ini sangat membuat rakyat menderita bahkan ada yang kehilangan nyawa.

"Jangan ngumpulin uang rakyat terus barangnya tidak ada, korbannya rakyat banyak, tidak benar bisnis seperti ini, menurut saya cara kerja Meikarta kalau seperti ini, sampai orang datang ke sini mengadu, memalukan. Catat, memalukan. Saya minta ini segera diselesaikan, itu harapan kami wakil rakyat. Jangan sampai orang enggak jelas nasibnya, saya dapat kabar ada yang sudah meninggal, ada yang stres tidak bisa bayar sekolahan anak, kan kasihan," terang Lasarus saat ditemui Parlementaria usai menerima aspirasi Komunitas Peduli Konsumen Meikarta di Ruang Sekretariat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan pihaknya akan mulai berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Perumahan sebagai bagian dari Kementerian PUPR yang merupakan mitra kerja dari



FOTO: ARF/PDT

Ketua Komisi V Lasarus saat menerima aspirasi Komunitas Peduli Konsumen Meikarta di Ruang Sekretariat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Komisi V dan juga akan menjalin komunikasi dengan Komisi XI terkait kasus kejelasan pembayaran angsuran hunian Meikarta yang juga diduga bermasalah. "Sebagai wakil rakyat kami mengimbau manakala Meikarta merasa salah, maka selesaikan," jelas Lasarus.

Lebih lanjut, Lasarus menyampaikan, pihaknya akan mendiskusikan kasus ini untuk memperjelas sejauhmana wewenang DPR dalam membantu para korban. "Mereka sudah membayar lunas, ada yang masih mengangsur sampai hari ini, tapi unitnya tidak ada. Kemudian sudah dikomunikasikan dengan pihak Meikarta juga tidak ada kejelasan

akhirnya datanglah ke DPR. Tadi saya sudah sampaikan, kami akan cek dulu sejauh mana kewenangan kami untuk menyelesaikan persoalan ini, terkait dengan masalah Meikarta," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana menyampaikan pihaknya menuntut pengembalian uang buntut ketidakjelasan hunian yang mereka beli sejak 2017. "Untuk Meikarta refund adalah harga mati kami, jadi kalau tidak *refund* saya akan kejar terus sampai dimana, terutama Grup Lippo (pengembang)," tutupnya. ● **we/aha**



Jelang Akhir Tahun, DPR Nilai Pemerintah Makassar Siap Hadapi Nataru

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai bahwa terkait persiapan dan kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 pihak pemerintah Makassar yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan SAR Nasional (BASARNAS) dinilai telah siap dalam menghadapi nataru terutama di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelabuhan

Soekarno-Hatta Makassar dan Stasiun Kereta Api Garongkong-Maros.

"Iya, jadi menjelang Nataru ini, pemerintah Makassar sudah siap dengan berbagai kesiapannya baik di darat, laut dan udara mengingat provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan pintu gerbang bagi Wilayah Indonesia Timur jadi saya harap ini semua harus dipersiapkan layanannya dengan baik," kata Iwan saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (2/12).

"Sebagai gerbang Wilayah Indonesia Timur, tentunya

Sulawesi Selatan kami harapkan mampu menyediakan fasilitas yang lebih baik lagi di sektor Perhubungan, mengingat pada bulan Desember akan ada arus mudik Nataru yang akan meningkat karena pandemi covid-19 sudah melandai," harap Iwan.

Selain Bandara dan Pelabuhan, Legislator Dapil Sulsel II itu mengatakan, bahwa pihaknya (Komisi V DPR) sangat bersyukur dengan adanya kereta api yang ikut membantu kelancaran mudik, karena dari pihak Balai Kereta Api Sulsel saat ini memberikan layanan gratis sampai dengan Desember 2022, sehingga moda transportasi ini menjadi salah satu alternatif di Makassar untuk dipergunakan.

"Sekarang sudah ada Kereta Api yang telah resmi beroperasi secara terbatas, dengan rute Stasiun Garongkong (Kab. Barru)-Stasiun Maros (Kab. Maros). Hadirnya Kereta Api ini diharapkan mampu mendorong minat masyarakat Sulawesi Selatan untuk menggunakan sarana Kereta Api sebagai alternatif perjalanan," tutup Iwan. ● **cas/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (2/12).

Legislator Minta Kejelasan Proyeksi Bisnis dan Penambahan PMN Garuda Indonesia Tahun 2023

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kejelasan proyeksi peluang bisnis Maskapai Garuda Indonesia untuk tahun 2023, termasuk kemungkinan adanya penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada entitas berkode saham GIAA tersebut. Hal itu diungkapkan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta.

"Bagaimana gambaran peluang bisnis Garuda untuk tahun 2023 baik domestik maupun penerbangan internasional? Apakah tahun 2023 akan kembali mengajukan PMN atau ada improvisasi dengan strategi lain dalam memenuhi kebutuhan Garuda?" tanya Nevi saat rapat berlangsung, Senin (5/12).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS itu juga mengapresiasi kinerja

Garuda terutama terkait pemulihan kondisi perusahaan tersebut. Ia pun meminta penjelasan terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari strategi yang dijalankan dan akan dilaksanakan. Hal ini menjadi perhatian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat termasuk terkait dengan pencairan PMN yang diajukan pada beberapa bulan lalu.

Terkait dengan komitmen mencetak profitabilitas yang sempat

disinggung dalam rapat, Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini mendorong Garuda Indonesia untuk memperhatikan beberapa rute potensial yang diproyeksi akan ramai pada akhir tahun.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiাপুত্রa pun mengungkapkan PMN senilai Rp7,5 triliun yang diberikan kepada maskapai pelat merah ini akan digunakan untuk biaya maintenance, restorasi, pemenuhan maintenance reserve serta modal kerja. Lebih jauh, diungkapkannya bahwa manfaat finansial pemberian PMN adalah diharapkan memperbaiki proyeksi pendapatan, EBITDA, EBITDAR, saldo akhir kas dan dapat menjadikan Garuda menjadi perusahaan yang sehat. ●

uc/rdn

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina.



FOTO: OJI/PDT



Legislator Harap BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuat *roadmap* (peta jalan) terpadu bagaimana peranan BUMN dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang rencananya akan mulai diresmikan pada 2024 mendatang. Menurutnya, *roadmap* tersebut penting untuk melihat sejauh mana BUMN berperan dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut.

"Saya ingin tahu peranan BUMN dalam pembangunan IKN ini secara menyeluruh. Kita harapkan BUMN itu punya *roadmap*, karena ketika saya bertemu dengan dirut-dirut dalam rapat selama ini mereka belum punya yang namanya rencana konkret keikutsertaan BUMN dalam pembangunan IKN," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Evita menilai, peranan BUMN dalam pembangunan IKN sebenarnya sangat banyak, mulai dari sektor aksesibilitas seperti bandar udara, transportasi darat, kelistrikan hingga akses internet. "Misalnya dari *holding* pariwisatanya, melalui In Journey (BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata) itu kan harus dibangun



Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (05/12/2022).

hotel di situ, harus dibangun Angkasa Pura di situ, ITDC nya juga harus ada. Tapi dari paparan para dirut ini ketika bertemu dengan kita, belum ada yang menggambarkan peranan BUMN itu di IKN," jelasnya.

Untuk itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap BUMN dapat memaparkan kepada Komisi VI DPR RI bagaimana *roadmap* yang dimiliki BUMN dalam menunjang pembangunan IKN nantinya. Terlebih, lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah menyebut bahwa pada 2024, akan diadakan perayaan

HUT RI di IKN untuk pertama kalinya.

"G20 kemarin Pak Jokowi mengatakan kita akan ikut *bidding* untuk penyelenggaraan Olimpiade 2036 di IKN. Ini semuanya harus di geber-geber, Pak. Harusnya BUMN ini punya *roadmap* terpadu. Itu yang kita minta nanti dipaparkan kepada kita khusus peranan BUMN dalam pembangunan IKN," harapnya.

Senada, Anggota Komisi VI Deddy Yevri Hanteru Sitorus juga mengatakan bahwa BUMN harus memiliki rencana besar jangka panjang, yaitu bagaimana BUMN berperan dalam pembangunan IKN dan wilayah penyangganya. "Ini termasuk Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, itu apa yang akan kita lakukan. Karena ketika nanti IKN sudah ada di sana, tentu ekosistemnya harus terbentuk, di situ lah BUMN saya kira harus masuk," ujarnya. • **bia/aha**

”
**PERANAN
BUMN DALAM
PEMBANGUNAN
IKN SEBENARNYA
SANGAT BANYAK**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Semakin Banyak Rumah Tangga Teraliri Listrik, Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menghadiri penyalaan pertama Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diah mengapresiasi program Kementerian ESDM ini. Menurutnya, semakin banyaknya rumah tangga yang sudah teraliri listrik, jelas ini sangat berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Hingga saat ini, masih banyak rasio tingkat elektrifikasi Jawa Barat yang belum seratus persen. Kita terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, khususnya

yang belum teraliri listrik," ungkap Diah Nurwitasari dalam keterangannya, usai peresmian dan penyalaan pertama BPBL di Provinsi Jawa Barat, Senin (5/12).

Melihat kondisi tersebut, jelas Politisi Fraksi PKS itu, kemudian Komisi VII DPR RI bersama Kementerian ESDM menyepakati untuk melaksanakan program BPBL ini. Selain berharap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Diah melihat ini sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Dalam hal ini, dengan adanya aliran listrik ini, anak-anak bisa belajar tidak hanya siang dan hal ini bisa dilakukan pada malam hari. Dimana dalam pembelajaran saat ini dengan era digital bisa dilakukan dengan adanya aliran listrik ini," sambungnya. Diah juga berharap, program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung, umumnya di Jawa Barat hingga seluruh wilayah Indonesia.

Diah menambahkan, saat ini di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung telah dilakukan pemasangan dari

”

DENGAN ADANYA ALIRAN LISTRIK INI, ANAK-ANAK BISA BELAJAR TIDAK HANYA SIANG DAN HAL INI BISA DILAKUKAN PADA MALAM HARI.

program ini sebanyak 2857 titik.

"Untuk di Jawa Barat total kurang lebih 14 ribu.

Sedangkan untuk program nasional menyasar 80 ribu rumah tangga,"

tandas Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II tersebut. ● **sf/aha**



Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari.



Diah Tolak Kekerasan & Diskriminasi Perempuan di Politik



FOTO: MRI/PDT

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Diah Pitaloka di dalam diskusi publik dan kampanye "Aksi Parlemen Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Politik", di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (29/11).

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Diah Pitaloka mendukung gerakan menolak aksi kekerasan terhadap perempuan dengan mengedepankan segala bentuk anti kekerasan, termasuk juga kekerasan di ranah politik seperti sikap diskriminatif. Hal itu disampaikan di sela-sela diskusi publik dan kampanye "Aksi Parlemen Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Politik", di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (29/11).

"Secara psikologis kan ya, perempuan itu kadang mengalami di-*underestimate* kan jika perempuan lebih ini dari laki-laki gitu. Sehingga dalam proses elektoral misalnya perempuan lebih

dianggap tidak pantas menjadi pemimpin karena dia perempuan. Nah kita menolak itu karena juga mendiskreditkan karena dia perempuan karena tubuhnya gitu loh," ungkap Anggota DPR RI yang duduk di komisi VIII itu.

Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan jika Kaukus Perempuan Parlemen RI tidak ingin nilai-nilai itu akan terus hidup di dalam demokrasi kita yang secara prinsip adalah mengedepankan martabat setiap warga negara termasuk juga perempuan.

"Kedua kita tidak mau juga ada bentuk pelecehan atau kekerasan fisik yang mungkin terbuka ataupun tidak terbuka di publik, ya kadang ada yang bersuara tapi banyak juga saya yakin yang tidak bersuara, ya syukur kalau itu tidak banyak tapi

kita berharap itu tidak ada *gitu loh*. kita enggak ingin ada intimidasi atau ada yang pelecehan gitu baik fisik terhadap perempuan di dalam kontestasi elektoral baik itu sebagai pemilih ataupun sebagai kandidat ataupun penyelenggara," tegasnya.

Diah Pitaloka juga menjelaskan jika kekerasan dalam politik itu banyak bentuknya kalau dalam perspektif undang-undang, tapi yang kita inginkan adalah semua proses demokrasi

yang mengedepankan sikap-sikap tidak toleran terhadap kekerasan termasuk pelecehan yang hari ini banyak ditemukan kekerasan terhadap perempuan.

"Deklarasi ini kita menyerukan berpandangan atau mendeklarasikan demikian menyatakan bahwa kita menolak dan kita berharap ini akan jadi juga didengar oleh masyarakat dan membuat masyarakat juga menjadi aware. Kedepannya langkah kami kita sebar di online masyarakat juga akan menyatakan pendapat dimana juga menjadi pendidikan untuk masyarakat gitu, sekaligus membangun kultur politik yang peka terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan secara khusus ataupun kepada laki-laki juga begitu," tandasnya. ● **rnm/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





FOTO: MCNU/PDT

Komisi IX DPR RI saat foto bersama usai menerima audiensi Tim Moringa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dukung Penanganan Stunting Melalui Tumbuhan Marungga NTT

Komisi IX DPR RI menerima audiensi Tim Moringa Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pembahasan upaya Pemerintah Provinsi NTT dalam menurunkan angka stunting di Provinsi NTT melalui pemanfaatan produk olahan tumbuhan kelor atau Marungga. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita menyampaikan dukungannya untuk pemanfaatan daun kelor dalam mengatasi stunting. Mengingat, angka prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong tinggi. "Kami mendukung

secara penuh untuk pemanfaatan daun kelor sebagai salah satu solusi penurunan angka stunting," ujar Felly.

Selain mudah tumbuh dan bisa ditanam di halaman rumah, Felly mengatakan, daun dengan nama latin Moringa Oleifera ini sangat bermanfaat. Menurutnya, khasiat daun kelor atau yang biasa dijuluki Superfood ini tidak perlu diragukan lagi. Bahkan WHO pun mengeluarkan kajian tentang Marungga sebagai salah satu sumber alternatif untuk mengatasi malnutrisi.

Politisi dari F-Partai NasDem juga ini menilai adanya perbedaan yang signifikan antara prevalensi stunting proyeksi nasional dengan kondisi riil yang ditemukan dilapangan. Menurutnya, kasus stunting masih

sering ditemukan di berbagai daerah. Karena itu, dibutuhkan penanganan multisektor dalam mengatasi stunting.

Dengan memberikan serbuk Marungga NTT dalam penanganan stunting juga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat secara kelompok maupun perorangan di Provinsi NTT. Tim Moringa juga mengusulkan agar Marungga NTT dapat dimasukkan dalam Permenkes untuk menjadi salah satu unsur tambahan olahan pangan pada menu PMT baik bagi balita maupun ibu hamil.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan akan menindaklanjuti permintaan tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Terkait anggaran, Melki menyebutkan pada tahun 2022 pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun untuk mendukung program percepatan pencegahan stunting. "Kami juga setuju agar dana stunting didesentralisasikan saja dikirim ke daerah, sehingga tugas daerah untuk menggunakan dana tersebut berbasis pada kasus stunting lokal karena daerah yang lebih paham," tandasnya. • **ann/aha**



Muhammad Rizal Minta Perbaiki Koordinasi terkait **Distribusi Vaksin Covid-19** di Tangsel

Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Rizal meminta Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), khususnya Dinas Kesehatan, untuk memperbaiki jalur koordinasi dan distribusi vaksin Covid-19 di wilayah tersebut. Sebab, menurutnya, terdapat perbedaan informasi, baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari Pemkot Tangsel. Pemkot Tangsel sampaikan nyatakan stok vaksin Covid-19 di Tangsel hampir kosong, sedangkan pihak Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa stok di wilayah Banten cenderung aman.

"Mudah-mudahan ini (koordinasi) segera mereka perbaiki. Dengan adanya peninjauan ini kita berharap Tangsel mulai melakukan pembenahan supaya masyarakat yang ada di Tangsel betul-betul sehat apalagi mereka membutuhkan (vaksin). Apakah memang tidak ada keinginan lagi masyarakat untuk melakukan vaksin, sehingga mereka nggak minta lagi? Mereka harus melakukan evaluasi, saya kira," ujar Rizal kepada Parlemen usai menghadiri Kunjungan Spesifik Tim Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Covid-19, ke Kantor Walikota Tangerang Selatan, Kamis (1/12).

Legislator Dapil Banten III ini juga mengungkapkan bahwa dirinya telah ikut memperjuangkan ketersediaan vaksin Covid-19 di wilayah Tangerang Raya dengan langsung menyampaikan permintaan stok vaksin ke Menteri Kesehatan. Untuk itu, ia berharap adanya perbaikan

koordinasi sehingga vaksinasi bisa dilakukan ke masyarakat yang membutuhkan.

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga meminta kepada Kepala Dinas kesehatan setempat untuk lebih serius untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 di Tangerang Selatan. Padahal, menurutnya, pengelolaan pemerintahan di Tangerang Selatan terhitung yang terbaik di Provinsi Banten. Terlebih dengan luasan wilayah yang cukup kecil seharusnya memiliki tingkat kerumitan yang tidak terlalu tinggi.

"Oleh karena itu kepala dinasnya harus lebih serius karena masyarakat

banyak membutuhkan vaksin. Tangsel ini, kalau saya lihat, termasuk yang paling bagus pengelolaan pemerintahannya dibandingkan dengan Kabupaten (Tangerang) misalnya. Tangsel kan hanya ada 7 kecamatan di Kabupaten ada 29 kecamatan, bisa lebih ruwet lagi," tutupnya.

Dalam rapat tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa saat ini kondisi ketersediaan vaksin Covid-19 di wilayah tersebut hanya tersedia 17 vial Pfizer 2 dosis dan 285 vial vaksin Indovax 10 dosis yang baru datang beberapa saat lalu. • uc/rdn



Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Rizal.

FOTO: UCA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kurikulum Bencana Jadi Bagian Penting dari Revisi RUU Sisdiknas

Kencana gempa Cianjur yang belum lama berlalu banyak memakan korban pelajar dan memantik keprihatinan banyak kalangan. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai bahwa Kurikulum bencana harus menjadi bagian penting dari revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang dibahas bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

"Kami menilai sudah saatnya Kurikulum Bencana ini menjadi bagian dari penting dari revisi RUU Sisdiknas yang saat ini digodok Kemendikbud Ristek. Dengan demikian upaya untuk mengurangi korban jiwa dan materi dalam setiap bencana bisa diwujudkan," ujar Syaiful Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (2/12).

Ketua Komisi X DPR RI
Syaiful Huda.

Huda menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi intensitas bencana yang cukup tinggi. Sebab, Indonesia berada di kawasan cincin api (*ring of fire*). Sehingga, hal itu memicu potensi gempa bumi, meletusnya gunung berapi, hingga tsunami merupakan fakta alam yang tidak bisa dihindari.

"BMKG mencatat sejak tahun 2008 hingga tahun 2015, tercatat

rata-rata kejadian gempa bumi sekitar 6.000 kejadian dalam setahun. Kemudian, pada tahun 2018 meningkat menjadi 11.920 kali dan pada tahun 2019 tercatat sekitar 11.588 kali kejadian. Setelah turun di 2020, di 2021 ada lompatan intensitas kejadian. Dan baru saja kita menjumpai fakta pahit bagaimana gempa Cianjur menimbulkan ratusan korban jiwa," jelas Politisi Fraksi PKB itu.

Meski begitu, ironisnya tak sedikit dari korban jiwa tersebut adalah para peserta didik. Dalam laporan Pemkab Cianjur disebutkan bahwa setidaknya ada 42 siswa dan 10 guru di level PAUD hingga sekolah menengah pertama yang menjadi korban meninggal saat gempa Cianjur itu.

Dengan demikian, ia mendesak agar Kemendikbud benar-benar menerapkan paradigma kebencanaan ini dalam proses penyusunan kurikulum pendidikan di Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019 pun telah menyerukan hal yang sama.

"Kami berharap ke depan kesadaran akan tingginya potensi bencana di Indonesia menjadi paradigma dalam penyusunan kurikulum pendidikan maupun penyusunan kebijakan publik lainnya. Sehingga kita bisa meminimalkan potensi korban jiwa maupun material dalam setiap bencana yang terjadi," pungkasnya.

● hal/rdn



FOTO: DEP/PDT



RDP Panja Perguruan Tinggi Komisi X dengan LLDIKTI Hasilkan Enam Butir Pandangan

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja (Panitia Kerja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) menghasilkan enam butir pandangan dari Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI. Diketahui bahwa Komisi X DPR RI juga mendukung LLDIKTI agar memiliki peran strategis termasuk dukungan anggaran agar bisa bekerja mencapai mutu perguruan tinggi lebih baik.

"Perlunya penguatan pengelolaan perguruan tinggi, dengan memperhatikan anggaran pendidikan, riset perguruan tinggi, pembinaan/akreditasi, tata kelola PTS (Perguruan tinggi swasta) yang bermutu dan lain lain," ujar Wakil ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (5/12).

Selain itu, lanjut Dede, Panja berpandangan perlu memaksimalkan anggaran fungsi pendidikan, dua puluh persen dari APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) agar dioptimalkan untuk Kemendikbudristek RI dan perlu afirmasi kepada PTS karena telah menampung Dosen,

mahasiswa dan meningkatkan APK (angka partisipasi kasar) Perguruan Tinggi.

Dalam kesempatan itu, Panja juga berpandangan, perlunya mengevaluasi beberapa hal, seperti evaluasi terhadap kriteria kompetisi dalam mendapatkan bantuan atau hibah kepada PTS, untuk peningkatan mutu agar terjadi keadilan dalam memberikan bantuan kepada PTS. Selain itu juga perlunya evaluasi terkait keberadaan Universitas Terbuka dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh yang berbasis daring menjadi luring.

"Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI juga menghimbau para narasumber (Kepala LLDIKTI dari

beberapa wilayah-red) agar secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan perguruan tinggi dan program turunannya dan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia," tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut juga terungkap berbagai permasalahan yang dialami oeh LLDIKTI dari berbagai wilayah yang hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya terkait permasalahan SDM (sumber daya manusia) termasuk jumlah dosen yang kurang, pendanaan, minimnya jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya. • **ayu,frh/aha**

FOTO:DEP/PDT



Wakil ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (5/12/2022).



Bahas Sejumlah Pasal RUU P2SK Bersama Pemerintah



FOTO: MICH/ PDI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit.

Panja Komisi XI DPR RI mulai membahas sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) bersama pemerintah. Dalam pembahasan kali ini, setidaknya ada 4 klaster dalam RUU P2SK dari rumusan pemerintah yang mendapat sorotan dari Komisi XI DPR RI, khususnya terkait pengawasan Koperasi yang menjadi wilayah kerja Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai gambaran, 4 klaster itu yakni klaster 1 yang terdiri dari Pasal 44 (Koperasi Menghimpun Dana), Pasal 44B (Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan

Koperasi oleh Kemenkop), dan Pasal 44C (Modal, Cadangan dan Hibah). Kemudian klaster 2, meliputi Pasal 44D (Kemenkop menyerahkan KSP ke OJK), Pasal 44E (Izin Usaha KSP oleh OJK), dan Pasal 44F (Anggaran Dasar Koperasi Persetujuan OJK)

Selanjutnya klaster 3 yang terdiri dari Pasal 44G (Pencabutan Izin Usaha oleh Kemenkop), Pasal 44H (Pembubaran Koperasi oleh Kemenkop), dan Pasal 44I (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU). Dan terakhir, klaster 4 yakni Pasal 319A yang terdiri dari dua poin, yaitu Penilaian KSP SJK dan Transformasi 6 bulan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menilai ada kejanggalan di Pasal 44F.

"Dari rumusan pemerintah, urusan sektor keuangan hanya Pasal 44D, 44E, 44F, yang lain itu urusan Kemenkop. (Pasal 44) Koperasi menghimpun dana itu normatif. (Pasal 44B) Perizinan itu oleh Kemenkop. Pasal 44G, Pasal 44H, Pasal 44I dan Pasal 319A itu Kemenkop. Jadi yang klaster 1, 3 dan 4 itu Kemenkop. Yang urusan di UU (P2SK) ini 44D, Pasal 44E dan Pasal 44F. Nah dari ketiga pasal itu, Pasal 44F ini yang janggal," kata Dolfie saat memimpin Rapat Panja bersama pemerintah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Politisi PDI-Perjuangan itu menilai, ada kejanggalan pada klaster 2 pada RUU P2SK rumusan pemerintah. "Kita (melihat) agak janggal ini. Alangkah baiknya memang ini masuk ruang lingkup keuangan, khusus di klaster 2 itu, Anggaran Dasar itu yang janggal. Karena terkesan ada Koperasi anggaran dasar Kemenkop, ada Koperasi anggaran dasar versi OJK," tandas Dolfie dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenkop UKM dan Kementerian Keuangan itu.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pasal yang menyangkut masalah sektor keuangan hanya pada Pasal 44D, Pasal 44E, dan Pasal 44F. Namun menurutnya yang terjadi sekarang ini adanya regulatory dan 'supervisory arbitrase', dimana RUU Perkoperasian belum mengatur mengenai pengaturan yang ada di Pasal 44B, termasuk perizinan dan pencabutan perizinan. ● **sf/aha**



BAKN Apresiasi Kinerja Bea Cukai Bali Nusa Tenggara

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengapresiasi kinerja Direktorat Bea Cukai Bali Nusa Tenggara (Bali-Nusra) dalam menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik dan optimal. Hal itu disampaikan Wahyu dalam rangka Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan pembahasan 'Potensi Penerimaan Cukai dan Kepabeanan'. Turut hadir Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati dan Amir Uskara, serta Anggota BAKN DPR RI Irwan Ardi Hasman dan Bachrudin Nasori.

Dalam kunjungan tersebut, Tim BAKN DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Benoa Cruise Terminal, dan Pelindo Properti Indonesia (PPI) yang berlokasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. "Hari ini kita meninjau pelabuhan Benoa dan melihat kegiatan bea cukai disini dan bagaimana penghasilan mereka dari kepabeanan dan cukai dari kegiatan ekspor impor;" ungkap Wahyu kepada **Parlementaria** usai pertemuan di Kantor Wilayah DJP Bea Cukai (DJPBC) Bali-Nusra, Tuban, Bali, Senin (28/11).

Politisi dari F-Partai Demokrat ini juga menilai Bea Cukai Bali-Nusra

sigap mengantisipasi kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Benoa dengan jadwal waktu yang tidak dapat diprediksi. Sehingga, hal itu mengakibatkan tidak terjadi penumpukan di pelabuhan. Mengingat, sektor pariwisata Bali yang perlahan mulai pulih dan menunjukkan tren positif.

Sementara itu, terkait ekspor dan impor yang dilaksanakan oleh DJPBC Bali-Nusra, Wahyu menyampaikan bahwa hasil dari kunjungan tersebut nantinya akan dilakukan telaah untuk memberikan rekomendasi untuk dinilai perlu tidaknya dilakukan perbaikan dalam proses keluar-masuk barang di Indonesia.

Di sisi lain, Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra menyampaikan tentang peran Bea Cukai dalam proses impor dan ekspor melalui Pelabuhan Benoa. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan mengenai bagaimana langkah Bea Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan Barang Kena Cukai (BKC) di Provinsi Bali. • **ann/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat melakukan peninjauan langsung ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Benoa Cruise Terminal, dan Pelindo Properti Indonesia (PPI) yang berlokasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.

FOTO: ANE/PDI

Deputi Administrasi Resmi Lantik 5 Pejabat di Setjen DPR RI



FOTO: MBI/PDT

Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Sumariyandono foto bersama usai melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap lima pejabat yaitu di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Sumariyandono secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap lima pejabat yaitu di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Pada seluruh pejabat yang dilantik, Sumariyandono menekankan pentingnya masing-masing pejabat untuk harus memperhatikan perkembangan transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kedepan sebagaimana target visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas yakni ASN bertaraf internasional.

"Syarat untuk bisa menjadi taraf internasional tersebut tentunya bahwa kita harus melakukan transformasi terhadap pola-pola kerja. Transformasi pertama adalah tentunya transformasi organisasi. Jadi, organisasi kita tidak boleh sama dengan yang saat ini dan sebelum-sebelumnya. Kita harus membentuk

sebuah organisasi modern, organisasi yang bisa merespon terhadap kebutuhan masyarakat serta organisasi yang fit dengan kebutuhan Setjen DPR RI," ujar Sumariyandono usai melantik di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Transformasi kedua, sambung Sumariyandono, adalah mengenai pola kerja atau mekanisme kerja. Transformasi mekanisme kerja yaitu masing-masing ASN harus bisa bersifat adaptif terhadap perubahan. Pola-pola kerja di belakang meja kerja yang 'duduk diam' ditegaskannya tidak boleh lagi dilakukan melainkan masing-masing ASN harus terus berupaya agar pola-pola kerja kedepan lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan kedepan.

Lebih lanjut, transformasi ketiga adalah transformasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kapasitas SDM

disebutnya sebagai syarat penting agar Setjen DPR RI bisa tetap mengikuti perkembangan zaman. "Jika mau lebih bertaraf internasional, maka kita harus meningkatkan kapasitas setiap ASN kita sehingga mempunyai kemampuan bersaing di tingkat internasional. Maka, ketiga hal transformasi tersebut perlu kita lakukan agar Setjen DPR RI menjadi sebuah organisasi yang bisa mengikuti perkembangan yang diharapkan," tandasnya.

Adapun, nama-nama kelima masing-masing pejabat yang baru saja dilantik tersebut yaitu Sondang E. Sinaga pada jabatan Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, Nurlatipah Nasir pada jabatan Widyaiswara Ahli Muda, Indra Cakra Buana pada jabatan Widyaiswara Ahli Muda, Muhammad Haqiqi Noviar pada jabatan Widyaiswara Ahli Muda dan Piping Effrianto pada jabatan Pembina Utama Muda (IV/C) sebagai Auditor Ahli Utama. ● **pun/aha**



BK DPR RI Tandatangani MoU dengan UKSW Salatiga

Badan Keahlian (BK) DPR RI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah. Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan MoU ini dalam rangka agar setiap pembahasan yang menyangkut dengan tugas dan fungsi DPR RI dilakukan dalam kaidah akademis dan berbasis bukti (*evidence-based*).

"Badan Keahlian menginginkan agar setiap pembahasan dalam pembuatan undang-undang, penetapan APBN, ataupun fungsi

pengawasan termasuk Panja-panja (Panitia Kerja) pengawasan, basisnya adalah basis akademis. Jadi, bukti argumentasi sebagaimana di lapangan dengan prakteknya, lalu secara teoritis juga kuat." ucap Inosentius Samsul kepada **Parlementaria**, usai penandatanganan MoU di UKSW, Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (1/12).

Pria yang kerap disapa Sensi ini menilai UKSW merupakan salah satu universitas swasta tertua dengan akreditasi tinggi yang didukung dengan tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas. "Kita tahu sebenarnya *resources-resources* di sini (UKSW) sangat kuat. Oleh karena itu, kita berharap kerjasama ini dapat



Kepala Badan Keahlian DPR RI di UKSW, Jawa Tengah.

membuka jalan supaya yang bisa disumbangkan oleh universitas ini (UKSW) dalam pembuatan kebijakan publik dapat tersalurkan." tegasnya. • **mun/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketidakjelasan Pembangunan Gedung Kantor Pusat OJK

Sudah 1 dekade Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sama sekali belum memiliki gedung perkantoran sendiri dan masih meminjam gedung Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta menyewa Wisma Mulia 2. Berdasarkan kondisi tersebut, OJK melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kemenkeu yang diantaranya mengatur bahwa OJK akan membangun 2 tower (Tower 1 dimiliki OJK, dan Tower 2 dimiliki Kemenkeu) dengan status tanah milik Kemenkeu yang berlokasi di Lot 1 SCBD. Dalam tahap tindak lanjut MoU dan PKS diketahui OJK telah melakukan pengkinian *roadmap* Gedung dengan anggaran pembangunan Gedung IdFC selama 8 tahun sebesar Rp5,59 triliun serta persiapan pembangunan Gedung menggunakan pengadaan dengan 6 (enam) konsultan jasa konsultasi dengan total sebesar Rp45,59 Milliar. Terdapat permasalahan pada pembangunan gedung kantor pusat OJK seperti belum jelas kelanjutannya dalam skema kerja sama maupun sumber pendanaan yang diungkap dalam pemeriksaan BPK RI atas LK OJK T.A 2020 & 2021 dan juga merupakan temuan berulang.

OJK belum melakukan tindak lanjut secara menyeluruh rekomendasi dari BPK RI terkait ketidakjelasan pada pembangunan gedung kantor pusat OJK berlokasi di Lot 1 SCBD.

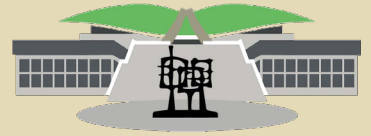
LK OJK TA 2020

Belum adanya kemajuan dan perkembangan signifikan pada proses pembangunan gedung IdFC karena biaya pembangunan tidak ada pada Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021.

LK OJK TA 2021



Atas permasalahan tersebut, DPR RI khususnya Komisi XI sebagai Lembaga legislatif diharapkan dapat menyerukan Dewan Komisiner OJK untuk berkomunikasi dengan Menteri Keuangan terkait pengkajian alternatif dan mengesahkan kebijakan dalam penyediaan gedung kantor dalam memenuhi kebutuhan operasional OJK dan melakukan pemeriksaan atas biaya persiapan Gedung Kantor Pusat OJK di Lot SCBD. Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber



Komisi I DPR RI saat mengunjungi rumah dinas Kepala Staf Angkatan Laut TNI, Laksamana Yudo Margono di Menteng Jakarta Pusat. FOTO: RSB/PDT



Pjt Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Suprihartini saat seminar Knowledge Sharing Kepustakawanan bertajuk "Eksistensi Pustakawan di Perpustakaan Khusus" di Ruangannya Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022). FOTO: ARF/PDT



Acara HUT Korpri ke-51 di Komplek Lingkungan DPR RI, Senayan, Jakarta, Jum'at (2/12/2022). FOTO: JKA/PDT

